

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

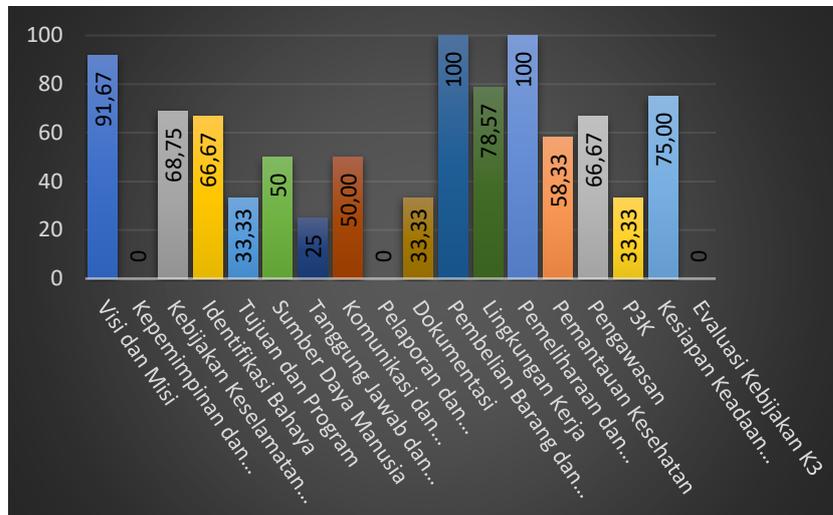
A. Deskripsi Data

Penelitian ini membahas tentang implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang ditinjau dari satu variabel yaitu sistem manajemen K3. Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang memiliki 2 bengkel yaitu Bengkel Konstruksi Kayu dan Bengkel Batu dan Beton. Bengkel Konstruksi Kayu memiliki luas bengkel 375 m² dengan rincian luas area kerja bengkel 300 m² dengan kapasitas 32 orang, 3 ruang alat dengan masing-masing ruangan memiliki luas sebesar 15 m², dan 1 ruang kepala bengkel dan teknisi sebesar 30 m². Bengkel Batu dan Beton memiliki luas 460 m², dengan rincian ruang teori sebesar 100m² dengan kapasitas 32 orang, luas area kerja bengkel 300m², 2 ruang penyimpanan alat dan bahan dengan masing-masing ruangan memiliki luas sebesar 15 m², dan 1 ruang kepala bengkel dan teknisi sebesar 30 m².

Pendeskripsian atau penyajian data dilakukan dengan menyimpulkan data-data hasil penelitian yang berasal dari data angket, wawancara, dan observasi, data tersebut lalu di cocokkan dan di cek dengan data dokumentasi setiap subindikator, selanjutnya data dipersentasikan, kemudian data dikriteriakan berdasarkan indikator untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi K3 berdasarkan sistem manajemen K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti

SMK N 1 Magelang memiliki ketercapaian 51,70%; sehingga masuk dalam kriteria cukup baik, hasil dari data penelitian dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.



Gambar 10. Grafik Ketercapaian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Berikut ini disajikan ringkasan deskripsi ketercapaian masing-masing subindikator implementasi sistem manajemen K3.

Tabel 4. Ringkasan Deskripsi Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Variabel	Subvariabel	Sub Indikator	Σ (%)	Kriteria
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Komitmen dan Kebijakan	a. Visi dan Misi	91,67	Baik, jika (76%-100%) Cukup, jika (51%-75%)
		b. Kepemimpinan dan Komitmen	0	
		c. Kebijakan K3	68,75	
	Perencanaan	a. Identifikasi Bahaya	66,67	
		b. Tujuan dan Program	33,33	
	Pelaksanaan	a. Sumber Daya Manusia	50	
		b. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat	25	
		c. Komunikasi dan Partisipasi dengan Peserta Didik	50	
		d. Pelaporan dan Pencatatan Kecelakaan Kerja	0	
		e. Dokumentasi	33,33	

Variabel	Subvariabel	Sub Indikator	Σ (%)	Kriteria
		f. Pembelian Barang dan Jasa	100	Kurang, jika (26%-50%) Tidak, jika (0%-25%)
		g. Lingkungan Kerja	78,57	
		h. Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana	100	
		i. Pemantauan Kesehatan	58,33	
		j. Pengawasan	66,67	
		k. P3K	33,33	
		l. Kesiapan Keadaan Darurat Bencana	75	
	Evaluasi	a. Evaluasi Kebijakan K3	0	

Data di atas merupakan data yang berasal dari data angket beserta wawancara, observasi, dicocokkan dan dicek dengan data dokumentasi setiap subindikator dan selanjutnya data dipersentasikan. Data angket diperoleh dengan cara memberikan angket kepada 4 responden yaitu 1 Ketua Program Studi Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti, 1 Kepala Bengkel Teknik Konstruksi Kayu, 1 Kepala Bengkel Teknik Konstruksi Batu dan Beton, dan 1 Teknisi. Data-data angket yang kontras dari setiap responden diklarifikasi melalui wawancara, untuk mendapatkan kejelasan pelaksanaan setiap subindikator. Wawancara dilaksanakan bersama dengan observasi, sebagai tindak lanjut dan berpedoman dari hasil data angket yang diperoleh. Adapun secara rinci, deskripsi hasil penelitian dari masing-masing indikator dan subindikator implementasi K3 diuraikan sebagai berikut:

1. Komitmen dan Kebijakan

Indikator komitmen dan kebijakan digunakan untuk mengetahui visi dan misi, kepemimpinan dan kebijakan, dan kebijakan K3 di Bengkel Program

Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang. Deskripsi hasil penelitian secara khusus setiap subindikator komitmen dan kebijakan dijelaskan sebagai berikut:

a. Visi dan Misi

Subindikator visi dan misi digunakan untuk mengetahui visi serta misi Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang sebagai pedoman untuk mencapai tujuan bengkel, komitmen dan tekad melaksanakan K3, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan bengkel secara menyeluruh yang bersifat umum atau operasional di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang.

Deskripsi hasil penelitian mengenai visi dan misi adalah sebagai berikut:

- 1) Ada visi dan misi tertulis dan sudah menyeluruh atau mencakup seluruh aktivitas di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang. Visi dan misi di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang belum mendefinisikan secara garis besar produk atau jasa, karena visi dan misi yang digunakan mengikuti visi dan misi sekolah.
- 2) Dokumentasi berupa foto visi dan misi yang terdapat di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa persentase visi dan misi adalah 91,67%; sehingga termasuk dalam kriteria baik.

b. Kepemimpinan dan Komitmen

Subindikator kepemimpinan dan komitmen digunakan untuk mengetahui komitmen Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang terhadap K3 yang diterapkan dalam sistem organisasi, sehingga penerapan K3 terkoordinasi secara menyeluruh di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang.

Deskripsi hasil penelitian mengenai kepemimpinan dan komitmen adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapat organisasi khusus K3 dalam Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang. Belum ada penyediaan anggaran khusus K3, anggaran masuk dalam bahan belanjaan praktik. Tidak ada pelatihan khusus tentang K3 yang dilakukan oleh ketua program studi teknologi konstruksidan properti, kepala bengkel, teknisi, dan instruktur/guru.
- 2) Tidak ada petunjuk baik lisan maupun tulisan, surat atau dokumen lain yang menunjukkan adanya unit khusus dan ketersediaan anggaran khusus dalam penerapan K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa persentase kepemimpinan dan komitmen adalah 0%, sehingga termasuk dalam kriteria tidak baik.

c. Kebijakan K3

Subindikator kebijakan K3 digunakan untuk mengetahui kebijakan K3 secara tertulis dan secara jelas menyatakan tujuan-tujuan K3 dan komitmen di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang. Kebijakan ini merupakan pedoman terhadap pelaksanaan K3 yang ada di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang.

Deskripsi hasil penelitian mengenai kebijakan K3 adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada kebijakan K3 secara tertulis yang membahas secara spesifik mengenai penerapan K3, penerapan K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang hanya berdasarkan tata tertib yang ada.
- 2) Tidak ada dokumen, surat atau buku yang menjadi acuan pasti kebijakan dalam penerapan K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa persentase kebijakan K3 adalah 68,75%; sehingga termasuk dalam kriteria cukup baik.

2. Perencanaan

Indikator perencanaan digunakan untuk mengetahui identifikasi bahaya serta tujuan dan program K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang. Deskripsi hasil penelitian secara khusus setiap subindikator perencanaan dijelaskan sebagai berikut:

a. Identifikasi Bahaya

Subindikator identifikasi bahaya digunakan untuk mengetahui bahwa Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang sudah mengidentifikasi dan menilai potensi bahaya yang ada di bengkel sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja saat proses belajar mengajar di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang berlangsung.

Deskripsi hasil penelitian mengenai identifikasi bahaya adalah sebagai berikut:

- 1) Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang sudah mengidentifikasi bahaya yang berada di lingkungan dan area bengkel yang dapat menimbulkan resiko kecelakaan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Namun tidak ada dokumen prosedur tertulis secara khusus dalam identifikasi bahaya yang ada di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang.
- 2) Dokumen yang dijadikan acuan adalah dokumentasi foto identifikasi bahaya di lingkungan dan area Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang dan poster K3. Tidak ada dokumentasi prosedur identifikasi bahaya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa identifikasi bahaya telah dilaksanakan dengan persentase 66,67%; sehingga termasuk dalam kriteria cukup baik.

b. Tujuan dan Program

Subindikator tujuan dan program digunakan untuk mengetahui program K3 dan tujuan dilaksanakannya K3. Program-program K3 dilaksanakan dalam suatu konsep dan memiliki indikator tertentu sehingga dapat diukur pencapaian tujuannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Deskripsi hasil penelitian mengenai tujuan dan program adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapat tujuan dan program yang spesifik dalam pelaksanaan K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang. Pelaksanaan K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang hanya berdasarkan kepada tata tertib di dalam bengkel.
- 2) Tidak terdapat dokumen tujuan dan program K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persentase tujuan dan program adalah 33,33%; sehingga termasuk dalam kriteria kurang baik.

3. Pelaksanaan

Indikator pelaksanaan digunakan untuk mengetahui sumber daya manusia, tanggung jawab dan tanggung gugat, komunikasi dan partisipasi dengan peserta didik, pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja, dokumentasi, pembelian barang dan jasa, lingkungan kerja, pemeliharaan dan perbaikan sarana, pemantauan

kesehatan, pengawasan, P3K, serta kesiapan keadaan darurat bencana di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang. Deskripsi hasil penelitian secara khusus setiap subindikator perencanaan dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Subindikator sumber daya manusia digunakan untuk mengetahui penunjukan dan orang yang bertanggung jawab K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang sudah dipegang oleh orang yang berkompeten atau orang yang terlatih dalam menangani K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang.

Deskripsi hasil penelitian mengenai sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

- 1) Penunjukan tenaga kerja sebagai penanggung jawab K3 dan pembentukan tim khusus K3 secara spesifik belum ada, namun semua tenaga kerja mempunyai tanggung jawab bersama dan mempunyai wewenang yang sama terhadap K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang. Hal tersebut juga terdapat dalam *jobsheet* yang mengharuskan siswa bertanya kepada instruktur/guru jika ada hal yang tidak dipahami saat praktik untuk meminimalisir kesalahan kerja. Instruktur/guru dan teknisi Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang belum mendapatkan pelatihan K3.
- 2) Dokumentasi berupa surat tugas dan *jobsheet*.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang memiliki persentase 50%, sehingga termasuk dalam kriteria kurang baik.

b. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat

Subindikator tanggung jawab dan tanggung gugat digunakan untuk mengetahui penanggung jawab terhadap K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang. Tanggung jawab ini berupa menentukan, menunjuk, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan K3 kepada semua warga sekolah khususnya di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang.

Deskripsi hasil penelitian mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada yang secara khusus bertanggung jawab terhadap penunjukan, menentukan, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan K3. Tidak ada tim khusus pada bidang K3. Tanggung jawab pada bidang K3 dipegang oleh seluruh tenaga kerja yang diterapkan pada *jobsheet* sebagai bentuk tanggung jawab terhadap K3.
- 2) Dokumentasi berupa *jobsheet* sebagai bentuk tanggung jawab guru untuk pedoman mengajar serta menjaga K3.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab dan tanggung gugat di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan

Properti SMK N 1 Magelang memiliki persentase 25%, sehingga termasuk dalam kriteria tidak baik.

c. Komunikasi dan Partisipasi dengan Peserta Didik

Subindikator komunikasi dan partisipasi dengan peserta didik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya tim K3 yang secara spesifik mengenai K3 seperti keadaan darurat, inspeksi, memberikan informasi kepada peserta didik melalui media yang ada tentang tim K3 tersebut dan informasi K3, serta memberi pelatihan K3 kepada peserta didik.

Deskripsi hasil penelitian mengenai komunikasi dan partisipasi dengan peserta didik adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada tim K3 yang secara spesifik dan terorganisir terbentuk. Hal ini dikarenakan masing-masing instruktur/guru mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap K3. Peserta didik diberikan pelatihan K3 melalui *job* K3 yang dilaksanakan pada kelas 10. Komunikasi K3 dilakukan melalui adanya poster dan pelaksanaannya juga dilakukan pada setiap kali praktik. Penerapan K3 diterapkan peserta didik dalam setiap praktik yang berlangsung.
- 2) Tidak adanya dokumentasi yang terkait dengan adanya tim K3 dan prosedur komunikasi K3 yang secara spesifik dibentuk di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang. Pelatihan K3 kepada peserta didik dapat dilihat dari adanya *job* K3 pada silabus kelas X. Penyebaran informasi dan pelaksanaan K3 dilakukan dengan poster-poster, spanduk dan peringatan K3, dan adanya unsur K3 dalam *jobsheet* praktik.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan partisipasi dengan peserta didik dilaksanakan dengan persentase 50%, sehingga termasuk dalam kriteria kurang baik.

d. Pelaporan dan Pencatatan Kecelakaan Kerja

Subindikator pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja digunakan untuk mengetahui pelaksanaan pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja yang dialami peserta didik serta ketidaksesuaian dan identifikasi bahaya atas kecelakaan yang terjadi.

Deskripsi hasil penelitian mengenai pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapat prosedur pelaporan kecelakaan kerja. Tidak ada pencatatan kecelakaan kerja maupun pencatatan ketidaksesuaian dan potensi bahaya atas kecelakaan yang terjadi.
- 2) Tidak ada dokumentasi yang berkaitan dengan prosedur, pelaporan, dan pencatatan kecelakaan kerja.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja belum dilaksanakan dengan persentase 0%, sehingga termasuk dalam kriteria tidak baik.

e. Dokumentasi

Subindikator dokumentasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya dokumentasi penerapan K3 yang berkaitan dengan sistem manajemen K3.

Dokumen diidentifikasi dalam penyimpanan dan penggunaannya, serta terdapat prosedur persetujuan, penerbitan, penyimpanan, dan pemusnahan dokumen K3.

Deskripsi hasil penelitian mengenai dokumentasi adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat dokumentasi berupa poster-poster K3 dan spanduk K3. Tidak adanya prosedur mengenai persetujuan, penerbitan, penyimpanan, serta pemusnahan dokumen K3.
- 2) Dokumen dalam hal ini adalah poster-poster K3 dan spanduk K3.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa dokumentasi telah dilaksanakan dengan persentase 33,33%; sehingga termasuk dalam kriteria kurang baik.

f. Pembelian Barang dan Jasa

Subindikator pembelian barang dan jasa digunakan untuk mengetahui pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pihak Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang.

Deskripsi hasil penelitian mengenai pembelian barang dan jasa adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam pembelian barang dan jasa sudah dilakukan konsultasi terlebih dahulu, hal ini telah disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pembelian barang berbahaya dan beracun tidak terdapat identifikasi secara khusus hanya dalam penyimpanan disediakan tempat khusus.

2) Dokumen acuan yang digunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelian barang dan jasa telah dilaksanakan dengan persentase 100%, sehingga termasuk dalam kriteria baik.

g. Lingkungan Kerja

Subindikator lingkungan kerja digunakan untuk mengetahui adanya pemeliharaan kebersihan area bengkel, penyingkiran barang yang tidak diperlukan dari area bengkel, pengaturan mesin-mesin di area bengkel, rambu-rambu area bengkel, ijin masuk, penguncian, tanda pada ruangan khusus di area bengkel, fasilitas di area bengkel, rambu K3, jalur evakuasi, dan adanya APAR di area bengkel.

Deskripsi hasil penelitian mengenai lingkungan kerja adalah sebagai berikut:

1) Pemeliharaan kebersihan dilakukan saat pagi hari sebelum adanya proses belajar mengajar, setelah selesai praktik siswa diwajibkan membersihkan area kerja, namun setelah kegiatan belajar mengajar selesai tidak dilakukan pembersihan sehingga kebersihan area bengkel kurang terjaga. Tanda atau rambu juga terpasang di area bengkel hanya berupa poster K3 dan spanduk K3. Pengaturan mesin-mesin telah dilakukan dan disesuaikan serta diberi garis area kerja untuk mengatur lalu lintas di dalam bengkel, sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar. Lingkungan bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi

dan Properti SMK N 1 Magelang juga tersedia fasilitas air bersih dan MCK telah sesuai dengan standar. Area bengkel juga terdapat APAR. Fasilitas tersebut sangat dibutuhkan jika terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu kebakaran. Beberapa barang yang tidak diperlukan sudah disingkirkan dari area bengkel sehingga tidak mengganggu kegiatan di area bengkel. Penataan peralatan bengkel sudah ada tempat dan ruangan khusus tetapi dalam penataan peralatan yang dipakai untuk praktikum tidak rapi dan tidak di letakkan pada tempat yang seharusnya.

- 2) Dokumentasi dalam hal ini berupa dokumentasi foto lingkungan dan area bengkel, penyimpanan alat dan bahan, serta ruang khusus untuk penyimpanan barang.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja telah dilaksanakan dengan persentase 78,57%; sehingga termasuk dalam kriteria baik.

h. Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana

Subindikator pemeliharaan dan perbaikan sarana digunakan untuk mengetahui adanya perawatan mesin dan perbaikan sarana.

Deskripsi hasil penelitian mengenai pemeliharaan dan perbaikan sarana adalah sebagai berikut:

- 1) Pada setiap mesin ditempatkan kartu cara pemakaian mesin sehingga jika terjadi kerusakan dapat diketahui penyebabnya. Pemeliharaan dilakukan ketika mesin terjadi kerusakan atau terdapat komponen yang hilang saja. Sarana dan prasarana

selalu diadakan penambahan dan peremajaan, serta terdapat kartu inventaris sarana dan prasarana dalam ruangan. Inventaris peralatan tertata dan dalam kondisi baik.

2) Dokumentasi berupa kartu penggunaan mesin dan foto inventaris ruangan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan dan perbaikan sarana telah dilaksanakan dengan persentase 100%, sehingga termasuk dalam kriteria baik.

i. Pemantauan Kesehatan

Subindikator pemantauan kesehatan digunakan untuk mengetahui pelayanan kesehatan yang memenuhi standar serta perlindungan lain, dalam hal ini asuransi terhadap peserta didik.

Deskripsi hasil penelitian mengenai pemantauan kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal pemantauan kesehatan, pihak SMK N 1 Magelang telah mempunyai ruangan khusus unit kesehatan. Hasil observasi menunjukkan pada unit kesehatan terdapat petugas medis atau guru yang bertanggung jawab menangani unit kesehatan sekolah. Asuransi pada siswa sudah ada sehingga jika terjadi kecelakaan kerja seluruh biaya ditanggung oleh pihak asuransi.
- 2) Dokumen dalam hal ini berupa foto ruangan unit kesehatan dan kartu asuransi siswa.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemantauan kesehatan telah dilaksanakan dengan persentase 58,33%; sehingga termasuk dalam kriteria cukup baik.

j. Pengawasan

Subindikator pengawasan digunakan untuk mengetahui pengawasan terhadap peserta didik berkaitan dengan resiko dan tingkat potensi bahaya dalam pelaksanaan praktik/pembelajaran.

Deskripsi hasil penelitian mengenai pengawasan adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam pelaksanaan praktik, siswa selalu diawasi oleh instruktur/guru yang mengajar hal ini bertujuan untuk menghindari resiko kecelakaan kerja. Guru mengawasi setiap aspek seperti pelaksanaan praktik yang sesuai SOP, namun dalam penggunaan APD tidak terlalu diperhatikan siswa yang praktikum hanya disarankan memakai pakaian kerja dan penggunaan benda praktik. Instruktur/guru juga telah mengidentifikasi bahaya dan membuat upaya pengendaliannya dengan memasukkan unsur keselamatan kerja pada *jobsheet*. Belum adanya dokumentasi yang menyatakan pencatatan kecelakaan akibat kerja oleh instruktur/guru.
- 2) Dokumentasi yang digunakan dalam hal ini berupa foto pelaksanaan praktik dan *jobsheet* praktik.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan telah dilaksanakan dengan persentase 66,67%; sehingga termasuk dalam kriteria cukup baik.

k. P3K

Subindikator P3K dilakukan untuk mengetahui jika penanganan dan kelengkapan P3K di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang telah memenuhi standar.

Deskripsi hasil penelitian mengenai P3K adalah sebagai berikut:

- 1) Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang tidak memiliki personal khusus yang menangani P3K, instruktur/guru tidak diberikan pelatihan P3K. Terdapat kotak P3K yang berada di area bengkel, didalam kotak P3K tersedia obat-obatan yang dapat memberikan pertolongan pertama akibat kecelakaan kerja dan kondisi kotak sudah memenuhi standar.
- 2) Dokumentasi dalam hal ini berupa foto kotak P3K yang berada di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa aspek P3K telah dilaksanakan dengan persentase 33,33%; sehingga termasuk dalam kriteria kurang baik.

l. Kesiapan Keadaan Darurat Bencana

Subindikator kesiapan keadaan darurat bencana digunakan untuk mengetahui jika Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang memiliki prosedur penanganan keadaan darurat atau bencana.

Deskripsi hasil penelitian mengenai kesiapan keadaan darurat atau bencana adalah sebagai berikut:

- 1) Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang telah memberikan pembelajaran simulasi keadaan darurat atau bencana didalam praktik *job* K3. Penandaan keadaan darurat juga sudah ada seperti jalur evakuasi. Tidak ada prosedur khusus yang tertulis dan dikomunikasikan ke warga sekolah. Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang juga telah diberi fasilitas alat penanganan keadaan darurat kebakaran yaitu APAR yang sesuai standar.
- 2) Dokumentasi dalam hal ini berupa *jobsheet* K3, foto jalur evakuasi, dan foto APAR.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa kesiapan untuk menangani keadaan darurat telah dilaksanakan dengan persentase 75%, sehingga termasuk dalam kriteria cukup baik.

4. Evaluasi Kebijakan K3

Indikator evaluasi digunakan untuk mengetahui evaluasi kebijakan K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang. Deskripsi hasil penelitian secara khusus subindikator evaluasi dijelaskan sebagai berikut:

a. Evaluasi Kebijakan K3

Subindikator evaluasi kebijakan K3 digunakan untuk mengetahui pelaksanaan evaluasi terkait kebijakan K3 dan revisi kebijakan K3.

Deskripsi hasil penelitian mengenai evaluasi kebijakan K3 adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya kebijakan K3 yang tertulis secara rinci sehingga membuat tidak adanya evaluasi kebijakan K3.
- 2) Tidak ada dokumen secara tertulis mengenai evaluasi kebijakan K3.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan K3 tidak dilaksanakan dengan persentase 0%, sehingga termasuk dalam kriteria tidak baik.

5. Hambatan dalam Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang

Hambatan yang ada di dalam implementasi sistem manajemen K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang antara lain:

- a. Belum ada pelatihan khusus instruktur/guru terkait dengan K3. Tidak adanya organisasi khusus di dalam penerapan K3, sehingga hal-hal kecil yang sebenarnya penting tidak terlalu diperhatikan seperti adanya tujuan dan program dari K3 sehingga tidak ada target dalam penerapan K3, tidak ada pencatatan dan pelaporan kecelakaan kerja sehingga tidak mengetahui statistik peserta didik yang mengalami kecelakaan kerja, hal ini digunakan untuk dasar evaluasi pelaksanaan K3, dan tidak ada evaluasi setiap tahunnya yang dapat membuat penerapan K3 dapat lebih maksimal.
- b. Hambatan yang berhubungan dengan minimnya ketersediaan dokumentasi tentang sistem manajemen K3. Oleh karena itu, mempengaruhi implementasi

sistem manajemen K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang.

6. Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam implementasi sistem manajemen K3 diatas yaitu perlu diadakannya pelatihan khusus instruktur tentang K3. Pembentukan organisasi khusus dalam penerapan sistem manajemen K3, pembuatan kebijakan secara tertulis tentang K3, pembuatan tujuan dan program secara tertulis tentang K3, membuat data serta pencatatan dan pelaporan tentang kecelakaan kerja, dan mengadakan evaluasi tentang penerapan K3 sehingga mutu K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang akan terus meningkat, dan persyaratan dalam pelaksanaan sistem manajemen K3 dapat di dokumentasikan.

B. Pembahasan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberhasilan implementasi sistem manajemen K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah sistem manajemen K3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem manajemen K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang masuk pada kategori tidak baik.

Penerapan K3 adalah suatu proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan K3. Penelitian kesiapan implementasi sistem manajemen K3 ini merupakan suatu upaya

untuk memperoleh informasi bagaimana penerapan pedoman K3 yang berada di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang. Hasil akhir penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk meningkatkan setiap aspek K3 dalam pelaksanaan sistem manajemen K3 sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Keselamatan Kerja adalah suatu syarat atau norma-norma kerja di segala tempat kerja dengan terus menerus wajib diciptakan dan dilakukan pembinaannya sesuai dengan perkembangan masyarakat, industri, dan teknologi. Seiring perkembangan teknologi dan dunia industri, upaya penerapan K3 dilaksanakan dalam sebuah sistem manajemen K3 yang terintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 mengenai sistem manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna tercapainya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan indikator dan subindikator penelitian implementasi sistem manajemen K3, pembahasannya diuraikan sebagai berikut:

1. Komitmen dan Kebijakan

Komitmen dan kebijakan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen dan kebijakan masuk pada kategori cukup baik. Hal yang sangat

mempengaruhi rendahnya pencapaian tersebut adalah tidak adanya unit khusus K3 dan tidak adanya dokumentasi yang mendukung, serta tidak adanya pelatihan K3 oleh ketua program studi keahlian teknologi konstruksi dan properti, kepala bengkel, dan teknisi. Ketercapaian 53,47% dari indikator komitmen dan kebijakan, tidak berarti secara tegas bahwa tidak ada pelaksanaan komitmen dan kebijakan tentang K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang. Setiap pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan praktik di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang selalu mengutamakan dan didasarkan pada komitmen terhadap K3. Belum adanya unit khusus K3 menyebabkan komitmen dan kebijakan K3 belum terdokumentasi. Secara khusus setiap subindikator komitmen dan kebijakan dijelaskan dibawah ini:

a. Visi dan Misi

Pedoman penerapan Sistem Manajemen dan Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per.05/men/1996, menjelaskan kebijakan K3 adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pengusaha dan atau pengurus yang memuat keseluruhan visi dan misi/tujuan perusahaan. Visi dan misi ini juga harus bersifat menyeluruh atau mencakup seluruh aktifitas di perusahaan serta visi dan misi secara garis besar menggambarkan produk, jasa, dan solusi di perusahaan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa visi dan misi di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang memiliki ketercapaian 91,67%. Hal ini menunjukkan bahwa Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang mempunyai visi dan misi

yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan. Rumusan visi dan misi Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang sudah bersifat menyeluruh atau mencakup seluruh aktifitas di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang serta visi dan misi secara garis besar menggambarkan produk, jasa, dan solusi di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang. Rumusan visi dan misi pada umumnya sudah terpasang di area Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang. Berdasarkan hasil wawancara, rumusan visi dan misi yang digunakan oleh organisasi Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang masih mengikuti visi dan misi sekolah. Tidak mempunyai visi dan misi secara mandiri. Visi dan misi di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang kurang efektif dan efisien karena masih bersifat umum dari berbagai kompetensi keahlian di sekolah, sehingga belum tentu sesuai apabila diterapkan di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang. Sebaiknya jurusan Program Studi Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang memiliki visi dan misi mandiri yang dapat menggambarkan sesuai keahlian yang ada di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang sehingga pengelolaan sumber daya akan lebih efektif dan efisien.

b. Kepemimpinan dan Komitmen

Pedoman penerapan Sistem Manajemen dan Keselamatan kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per.05/men/1996, menjelaskan dalam pengelolaannya pengurus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap K3 dengan menyediakan sumber daya yang memadai dan anggaran dalam penerapan K3. Sumber daya ini dibentuk dalam satu unit khusus dalam organisasi untuk mengkoordinasi pelaksanaan K3, sehingga setiap orang yang berada di area bengkel/praktik dan lingkungan Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang dapat berperan serta dalam menjaga K3.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan dan komitmen tercapai 0%, dikarenakan tidak adanya unit khusus dalam penanganan K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang, sehingga tidak ada penempatan unit K3 dalam struktur organisasi yang dapat menentukan keputusan program K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang. Tidak adanya tim K3 maka pelaksanaan K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang menjadi tidak terkoordinasi dengan baik. Terlebih belum ada pelatihan K3 secara khusus terhadap ketua program studi keahlian teknologi konstruksi dan properti, ketua bengkel, teknisi, dan instruktur/guru pengajar di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang. Pelatihan khusus K3 untuk ketua program studi keahlian teknologi konstruksi dan properti, kepala bengkel, teknisi, dan instruktur/guru memang belum ada. Setiap

istruktur/guru mengusahakan pelaksanaan K3 dapat berjalan dengan baik di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang.

Pimpinan sangat dibutuhkan perannya pada saat pelaksanaan K3 untuk menemukan penerapan K3 yang tidak sesuai dengan rencana sehingga dapat dilakukannya evaluasi terhadap K3 agar penerapan K3 dapat ditingkatkan sampai maksimal.

c. Kebijakan K3

Mengacu pada pedoman sistem manajemen K3, Kebijakan K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang yang memuat keseluruhan visi dan tujuan, komitmen dan tekad dalam melaksanakan K3, kebijakan K3 yang mencakup kegiatan di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang secara menyeluruh bersifat umum atau operasional, sehingga hal-hal yang menyangkut kebijakan K3 tersebut dapat disosialisasikan kepada setiap orang di lingkungan Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang memiliki ketercapaian 68,67%; hal ini dikarenakan belum adanya dokumentasi kebijakan K3 sebagaimana dimaksud dalam sistem manajemen K3. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edi kebijakan K3 ada pada sekolah sehingga berlaku secara

keseluruhan yang meliputi pencegahan seperti pemasangan poster K3, penanganan meliputi pembelian APD, tata tertib di dalam Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang dan penanganan ketika terjadi kecelakaan kerja seperti adanya asuransi untuk siswa dan tenaga kerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/Men/1996 Pasal 3, setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan sistem manajemen K3. Perusahaan/instansi pendidikan yang mempunyai resiko terhadap K3 wajib melaksanakan ketentuan salah satunya adalah menetapkan kebijakan K3, dan menjamin komitmen terhadap implementasi sistem manajemen K3, dalam hal ini Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang perlu membuat dan melaksanakan kebijakan khusus K3 sesuai implementasi sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3 wajib dilaksanakan oleh pengurus, pengusaha, dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan, sehingga dengan adanya kebijakan K3 yang telah dikonsultasikan dalam manajemen dan tersosialisasi, dapat meningkatkan penerapan K3 diseluruh tingkatan dan lingkungan Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang.

2. Perencanaan

Perencanaan dalam sistem K3 adalah tindak lanjut dari komitmen dan kebijakan K3. Secara khusus dari semua item dalam setiap subindikator, indikator perencanaan masuk dalam kategori tidak baik. Hasil tersebut didapat dari pelaksanaan indentifikasi bahaya di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang. Identifikasi potensi bahaya membuktikan adanya komitmen terhadap K3, namun seperti halnya pada indikator komitmen dan kebijakan, rendahnya pencapaian indikator perencanaan dikarenakan belum adanya dokumentasi prosedur identifikasi bahaya serta dokumentasi sistem manajemen K3. Penjelasan setiap subindikator dalam indikator perencanaan, dijelaskan sebagai berikut:

a. Identifikasi Bahaya

Dalam mengidentifikasi bahaya pihak Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang harus membuat sebuah rencana yang efektif untuk mencapai keberhasilan dalam penerapan sistem manajemen K3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan harus memuat tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang diterapkan mempertimbangkan identifikasi sumber bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku serta hasil pelaksanaan tinjauan awal terhadap K3.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa identifikasi bahaya di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang memiliki ketercapaian 66,67%. Angka tersebut menunjukkan bahwa Bengkel Program

Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang telah melakukan beberapa identifikasi bahaya yang ada di lingkungan Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 9 Ayat 2 yaitu dengan mempertimbangkan: (a) hasil penelaah awal, (b) identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko, (c) peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan; (d) sumber daya yang dimiliki. Sehingga bisa merencanakan bagaimana proses dan tempat untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di lingkungan yang aman, jauh dari resiko terjadinya kecelakaan kerja. Prosedur yang jelas secara tertulis tidak ada dalam identifikasi bahaya di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang. Hal ini membuat identifikasi bahaya tidak dapat digambarkan secara jelas dan terkoordinasi pada setiap tenaga kerja serta lingkungan Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang secara luas. Identifikasi bahaya yang jelas, prosedur, dan terdokumentasi dengan baik dapat berguna untuk memetakan lingkungan sesuai tingkat potensi bahaya agar dapat diketahui setiap orang yang berada di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang, sebagai upaya peningkatan pelaksanaan K3.

b. Tujuan dan Program

Penetapan tujuan dan program-program K3 adalah tindak lanjut dari kebijakan K3 yang telah ditetapkan, yang dipertimbangkan berdasarkan hasil identifikasi bahaya. Kebijakan K3 yang telah ditetapkan dan disetujui oleh ketua

Program Studi Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang, selanjutnya dikembangkan menjadi program-program K3 dengan konsep tertentu sesuai dengan kondisi di lingkungan Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang dan memiliki jangka waktu tertentu sehingga dapat diukur pencapaiannya dan dievaluasi setiap periode. Tujuan dan program K3 dikonsultasikan kepada ahli K3 agar pelaksanaannya dapat terjaga kualitasnya. Tujuan dan program ini juga menjadi tindak lanjut yang nyata dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tujuan dan program K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang memiliki ketercapaian 33,33%. Tujuan dan program K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang hanya sebatas tata tertib di dalam bengkel. Tidak terdapatnya tujuan dan program K3 yang jelas dikarenakan belum adanya kebijakan K3 yang terdokumentasi sesuai dengan panduan sistem manajemen K3. Hal tersebut membuat pelaksanaan K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang berjalan kurang baik dan kurang terarah, sehingga akhirnya memungkinkan tidak bisa mengikuti program-program K3 yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan pedoman sistem manajemen K3, kebijakan K3 dibuat berguna dalam membuat perencanaan K3 yang termasuk penentuan program dan tujuan pelaksanaan K3. Program yang ada hanya sebatas tata tertib di dalam bengkel. Tidak adanya program yang ditetapkan oleh ketua program studi keahlian teknologi konstruksi dan properti inilah yang kemudian sulit untuk mengukur pencapaian penerapan K3

terutama pada kecelakaan yang tidak diketahui oleh instruktur/guru praktik, tidak terdokumentasi serta potensi bahaya yang tidak kasat mata.

3. Pelaksanaan

Indikator pelaksanaan masuk dalam kategori cukup baik. Hasil pelaksanaan ini termasuk dalam kondisi cukup baik. Hasil tersebut dapat tercapai karena pada subindikator yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik tercapai cukup tinggi seperti pada subindikator pembelian barang dan jasa, lingkungan kerja, perbaikan saran dan prasarana serta kesiapan keadaan darurat bencana. Hal yang membuat hasil hanya dalam kategori cukup dikarenakan beberapa hal yang berkaitan dengan dokumentasi tidak terlaksana. Tingginya hasil dari subindikator yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik membuktikan jarang terjadi kecelakaan kerja di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang, meskipun pencatatan kecelakaan kerja itu sendiri belum terdokumentasi secara khusus. Setiap subindikator dalam indikator penerapan dijelaskan dalam pembahasan di bawah ini:

a. Sumber Daya Manusia

Peningkatan K3 akan lebih efektif apabila semua pihak didorong untuk berperan aktif dalam penerapan dan pengembangan sistem manajemen K3, serta memiliki budaya yang mendukung dan memberikan kontribusi bagi sistem manajemen K3. Untuk menjamin keselamatan di tempat kerja terdapat komponen-komponen penting menurut Suma'mur (1985: 311) yaitu tanggung jawab pimpinan perusahaan/instansi, pendelegasian wewenang kepada staf pengawasan, status dan

kegiatan panitia keselamatan, peranan ahli keselamatan, dan lain-lain. Sehingga penunjukan penanggung jawab K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang sangat diperlukan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang memiliki ketercapaian 50%, hal ini dikarenakan penunjukan penanggung jawab K3 secara jelas dan tim khusus dalam hal K3 belum ada. Instruktur/guru belum mendapat pelatihan K3 secara khusus. Pelaksanaan K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang merupakan tanggung jawab bersama semua tenaga kerja yang ada di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang. Penanggung jawaban jika terjadi kecelakaan kerja yaitu instruktur/guru yang sedang mengajar saat terjadi kecelakaan kerja tersebut, yang selanjutnya akan diberikan laporan kepada kepala bengkel dan ketua program studi keahlian teknologi konstruksi dan properti, namun dengan diberikannya tanggung jawab yang sama kepada setiap instruktur/guru dan teknisi, maka akan lebih baik semua instruktur/guru dan teknisi diberi pelatihan K3 agar penerapan berjalan dengan baik.

b. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat

Sistem pertanggung jawaban harus ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen perusahaan yang bersangkutan untuk menjamin perencanaan tersebut dapat dilaksanakan. Peningkatan K3 akan efektif apabila semua pihak dalam perusahaan didorong untuk berperan serta dalam

penerapan dan pengembangan sistem manajemen K3, dan memiliki budaya perusahaan yang mendukung dan memberikan kontribusi bagi sistem manajemen K3. Menjamin keselamatan di tempat kerja terdapat komponen-komponen penting menurut Suma'mur (1985: 311) yaitu tanggung jawab pimpinan perusahaan/instansi, pendelegasian wewenang kepada staf pengawasan, status dan kegiatan panitia keselamatan, peranan ahli keselamatan, dan lain-lain. Sehingga penunjukkan penanggung jawab K3 di program keahlian yang ada di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang sangat diperlukan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab dan tanggung gugat di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang memiliki ketercapaian 25%. Dikarenakan penunjukkan penanggung jawab K3 secara spesifik belum ada, namun semua instruktur/guru mempunyai tanggung jawab bersama dan mempunyai wewenang yang sama terhadap K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang. Ketua Program Studi Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti diberi tanggung jawab dan wewenang lebih atas K3 di program keahliannya. Semua instruktur/guru bertanggung jawab menangani keadaan darurat, namun instruktur/guru belum mendapatkan pelatihan K3 sehingga perlu instruktur/guru yang menangani K3, semuanya diberi pelatihan. Bentuk tanggung jawab instruktur/guru diterapkan hanya sebatas pada *jobsheet* sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pada K3.

c. Komunikasi dan Partisipasi dengan Peserta Didik

Keberhasilan sistem manajemen K3 tergantung dari bagaimana penginformasiannya, hal ini sesuai dengan pernyataan Suma'mur (1985: 49) bahwa kemampuan suatu sistem sampai tingkat tertentu tergantung kepada kualitas komunikasi di antara aneka unsur. Adanya komunikasi yang efektif dan pelaporan rutin merupakan merupakan sumber penting dalam penerapan sistem manajemen K3. Hal ini dikarenakan penyediaan informasi yang sesuai untuk peserta didik dan semua pihak yang ada di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang sehingga dapat menjadi motivasi dan pendorong penerimaan serta pemahaman dalam upaya meningkatkan kinerja K3.

Hasil penelitian komunikasi dan partisipasi dengan peserta didik tercapai 50%, pencapaian ini didapat dari sudah dilakukannya penyebaran informasi K3 kepada peserta didik menggunakan media poster tentang K3 dan sudah dilakukannya pelatihan K3 bagi peserta didik secara khusus yang didapatkan pada kelas X dalam mata pelajaran K3. Komunikasi dan partisipasi peserta didik tidak mencapai persentase sempurna dikarenakan tidak adanya tim K3 sehingga tidak ada penyebarluasan keberadaan tim K3 dan tidak adanya prosedur komunikasi antara tim K3 dengan peserta didik mengenai penerapan K3. Tim K3 adalah tim yang dibentuk secara spesifik untuk menangani keadaan darurat, inspeksi, dan memberikan informasi kepada peserta didik melalui papan pengumuman yang memuat anggota tim K3, bahkan diperusahaan pembentukan tim K3 sudah diwajibkan, dengan adanya tim K3 permasalahan tentang K3 yang dialami oleh peserta didik dapat dicarikan solusinya sesuai dengan prosedur pedoman K3.

Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang tidak terdapat tim K3, sehingga masing-masing instruktur/guru dan teknisi mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap K3 pada peserta didiknya.

d. Pelaporan dan Pencatatan Kecelakaan Kerja

Pencatatan kecelakaan kerja digunakan untuk mengetahui jumlah statistik peserta didik yang mengalami kecelakaan kerja, hal ini digunakan untuk dasar evaluasi pelaksanaan K3 serta pendataan terhadap penerimaan santunan bila tersedia asuransi kepada siswa. Pelaporan ini juga berguna dalam identifikasi ketidaksesuaian dan potensi bahaya atas kecelakaan yang terjadi, untuk mencegah terjadinya hal yang sama di waktu yang akan datang.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang belum terlaksana dengan ketercapaian 0%, hal ini dikarenakan setiap kecelakaan yang terjadi di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang belum dicatat secara khusus. Tidak ada prosedur pelaporan terjadinya insiden atau pencatatan setelahnya. Jika terjadi kecelakaan maka akan diobati di pelayanan kesehatan sekolah, dan bila diperlukan tindakan lebih lanjut maka akan dibawa ke rumah sakit dengan biaya dari asuransi. Menurut Suma'mur (1985: 13) pencatatan kecelakaan kerja pada tahun-tahun yang berbeda sangat berguna untuk menilai kecelakaan bertambah atau berkurang dan untuk mengetahui efektif tidaknya usaha pencegahan. Meskipun kecelakaan yang terjadi sangat sedikit, namun pembuatan dokumentasi kecelakaan kerja yang terjadi tetap

diperlukan. Dengan tidak adanya pencatatan kecelakaan yang terjadi maka pihak Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang tidak dapat mengetahui kinerja K3 yang telah dilaksanakan, terlebih untuk menjadi evaluasi potensi bahaya yang terjadi di tahun-tahun yang cukup lama berlalu yang dapat timbul kembali tanpa diketahui oleh orang yang ada di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang.

e. Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi untuk menunjang pelaksanaan K3, sebagai catatan-catatan pedoman K3, dan program-program yang akan dicapai serta yang telah dicapai dalam kaitannya dengan evaluasi penerapan K3. Dokumentasi dapat berupa *softfile* maupun *hardfile*. Dokumen tersebut diidentifikasi dalam penyimpanan dan penggunaan sesuai jenisnya.

Hasil penelitian menunjukkan dokumentasi memiliki ketercapaian 33,33%; hasil ini didapat karena tidak adanya identifikasi dalam penyimpanan dan penggunaan dokumentasi K3, serta tidak ada prosedur persetujuan, penerbitan, penyimpanan, dan pemusnahan dokumen K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang. Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang terdapat poster tentang K3 tetapi jika tidak ada identifikasi dan pengendalian akan membuat dokumentasi K3 tidak terawat.

f. Pembelian Barang dan Jasa

Dalam sistem pembelian barang dan jasa harus dicek terlebih dahulu bahwa produk barang dan jasa serta mitra kerjanya memenuhi persyaratan K3 pada saat barang diterima di tempat kerja. Pembelian barang dan jasa ini akan berkaitan dengan pencegahan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja sehingga pihak Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang perlu memperhatikan dalam hal pembelian barang dan jasa.

Hasil penelitian menunjukkan pembelian barang dan jasa memiliki ketercapaian 100%, dalam pembelian barang dan jasa perlu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang menggunakan pedoman Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam melakukan konsultasi pembelian barang dan jasa serta informasi spesifikasi barang dan jasa yang diadakan sangat diperhatikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengadaan bahan berbahaya dan beracun, sudah dilakukan identifikasi khusus, dalam penyimpanannya sudah dilakukan seperti penyimpanan bahan bakar yang diberi peringatan bahan mudah terbakar dan disediakan APAR didekatnya. Menurut Suma'mur (1985: 268) bahan-bahan berbahaya adalah: bahan-bahan yang selama pembuatannya, pengolahannya, pengangkutannya, penyimpanan, dan penggunaannya mungkin menimbulkan atau membebaskan debu-debu, kabut, uap-uap, gas-gas, serat atau radiasi mengion yang mungkin menimbulkan iritasi, kebakaran, ledakan, korosi, mati lemas, keracunan, dan bahaya-bahaya lain dalam

jumlah yang memungkinkan gangguan kesehatan orang yang bersangkutan dengannya atau menyebabkan kerusakan kepada barang-barang atau harta kekayaan.

Identifikasi terhadap bahan berbahaya dapat meminimalisir resiko terjadinya kerugian bila terjadi keadaan darurat, karena bahan berbahaya telah disediakan tempat khusus untuk penyimpanannya. Teknisi harus menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang tersebut harus mengenali identifikasi bahaya dan mengendalikan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

g. Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja merupakan hal penting didalam penerapan K3, menurut Suma'mur (1985: 9) penyebab kecelakaan kerja salah satunya adalah keadaan lingkungan kerja yang tidak aman (*unsafe condition*), sehingga peranan lingkungan kerja terhadap K3 sangat penting.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang memiliki ketercapain 78,57%; hal ini dapat terjadi karena semua aspek yang perlu dilakukan di dalam lingkungan kerja sudah diterapkan mulai dari kebersihan area bengkel yang sudah dilakukan sebelum dan sesudah dilakukannya pembelajaran, penyingkiran barang yang tidak diperlukan sehingga tidak mengganggu peserta didik saat melakukan praktik, pengaturan mesin mesin yang sudah tertata rapi, terdapatnya rambu-rambu di area bengkel seperti area mudah terbakar, terdapatnya fasilitas bengkel berupa air bersih dan MCK yang sudah sesuai standar, dan sudah

tersedianya tanda jalur evakuasi dan APAR di beberapa titik area bengkel, akan tetapi ijin masuk, penguncian, dan rambu ruang khusus area bengkel belum ada, sehingga siswa dapat mengakses kesemua ruangan terutama ruangan untuk penyimpanan bahan berbahaya. Kunci ruangan penyimpanan pun dapat diakses atau dipinjam oleh siswa dengan mudah, hal ini dapat membahayakan siswa jika siswa tidak diawasi dengan ketat karena dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan siswa.

h. Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana

Pemeliharaan dan perbaikan sarana di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang telah diterapkan dengan baik. Perawatan mesin telah dilakukan dengan adanya kartu jadwal pengguna sehingga jika terdapat kerusakan dapat dipertanggung jawabkan oleh pengguna terakhir.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemeliharaan dan perbaikan sarana di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang memiliki ketercapaian 100% dan angka tersebut termasuk dalam kategori baik. Menurut suma'mur (1985: 293) mengatakan bahwa peremajaan dilakukan dengan pengadaan sarana dan prasarana baru, namun bila tidak ada perawatan yang teratur maka dapat menimbulkan potensi bahaya. Meskipun angka kecelakaan yang ditimbulkan oleh mesin 15-25% dari seluruh kecelakaan yang biasanya angka berat kecelakaan adalah tinggi, sehingga perlu ditingkatkan dalam pemeliharaan dan perbaikan sarana. Perawatan alat harus teliti dan harus ada kerjasama dari seluruh pihak agar dapat membantu dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana

yang berada di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang.

i. Pemantauan Kesehatan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dijelaskan tentang penilaian pedoman penerapan sistem manajemen K3, perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan, disebutkan juga bahwa pemeriksaan dilakukan oleh dokter pemeriksa yang telah ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemantauan kesehatan memiliki ketercapaian 58,33%. Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang telah memiliki pelayanan kesehatan. Ketercapaian yang tidak maksimal ini dikarenakan pelayanan kesehatan belum sesuai dengan standar karena saat dilakukan tinjauan saat penelitian tidak ada dokter periksa ataupun petugas yang berjaga. Tidak terdapatnya dokter periksa atau petugas yang berjaga membuat pelayanan kesehatan tidak maksimal. Asuransi kesehatan sudah diberikan kepada peserta didik sehingga jika terjadi kecelakaan kerja saat praktik maupun saat pembelajaran dikelas biaya pengobatan ditanggung oleh pihak asuransi.

j. Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur petunjuk kerja yang telah ditentukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang memiliki ketercapaian 66,67%. Peserta didik sudah diawasi sesuai dengan tingkat resiko saat melakukan praktik. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam merencanakan penerapan K3 memprioritaskan urutan pekerjaan berdasarkan tingkat resiko, dimana pekerja yang mempunyai tingkat resiko yang tinggi diprioritaskan, sehingga resiko kecelakaan kerja seperti tersengat listrik, terkena benda yang bergerak/berputar, menghirup asap dan debu yang signifikan, tidak terjadi saat melakukan praktik. Hal ini dikarenakan instruktur/guru telah mengidentifikasi bahaya dan membuat upaya pengendaliannya, meskipun tidak mencakup secara menyeluruh dalam prosedur identifikasi. Identifikasi terindikasi dari penyertaan aspek K3 yang tertuang dalam pengantar *jobsheet*.

Instruktur/guru belum sepenuhnya diikutsertakan dalam pelaporan dan penyelidikan penyakit akibat kecelakaan kerja jika terjadi kecelakaan kerja, selain itu instruktur/guru juga belum wajib menyertakan laporan dan saran-saran kepada ketua program studi keahlian teknologi konstruksi dan properti.

k. P3K

Untuk mengurangi pengaruh yang mungkin timbul akibat insiden, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja penyediaan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup sampai mendapat pertolongan medis.

Hasil penelitian menunjukkan P3K di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang memiliki ketercapaian 33,33%; hal ini tercapai karena sudah terdapat kotak P3K beserta isinya tetapi belum adanya personel khusus yang menangani P3K dan tidak adanya pelatihan P3K untuk instruktur/guru membuat hasil penelitian pada P3K menjadi rendah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :Per.15/Men/Vii/2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja Pasal 1, P3K di tempat kerja adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja/buruh/dan atau orang lain yang berada di tempat kerja, yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja, sehingga belum adanya pelatihan khusus P3K kepada instruktur/guru sebagai penanggung jawab saat terjadinya kecelakaan kerja pada waktu pelaksanaan praktik, dapat membuat pertolongan pertama yang diberikan kurang tepat.

1. Kesiapan Keadaan Darurat Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja perlunya prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan menyolok serta diketahui oleh seluruh tenaga kerja di perusahaan. Kebanyakan kecelakaan terjadi terhadap peserta didik yang belum terbiasa dengan bekerja secara selamat. Menurut Suma'mur (1985: 310) penyebabnya adalah ketidaktahuan tentang bahaya atau ketidaktahuan cara pencegahannya, sekalipun tahu tentang adanya suatu resiko bahaya tersebut, sehingga pentingnya kesiapan peserta didik

dalam menangani keadaan darurat agar peserta didik tahu bahaya dan pencegahannya saat praktik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan keadaan darurat bencana di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang memiliki ketercapaian 75%. Pencapaian ini didapat karena Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang sudah terdapat tanda jalur evakuasi, nomor darurat, dan tertempel di lingkungan Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang, akan tetapi prosedur tentang pengurangan resiko bencana alam dan kebakaran belum ada, sehingga dapat mempengaruhi pemahaman siswa dalam menghadapi resiko atau bahaya saat terjadi bencana alam atau kebakaran. Tersedianya APAR jika terjadi kebakaran. Pada jangka waktu tertentu untuk APAR selalu diperbaharui sesuai dengan perawatan berkala. Pelatihan simulasi jika ada keadaan darurat juga sudah dilakukan melalui mata pelajaran K3 yang ada pada kelas X, mata pelajaran K3 ini berisi tentang cara pemadaman api menggunakan karung goni yang dibasahi dan menggunakan APAR.

4. Evaluasi Kebijakan K3

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan guna mencapai tujuan sistem manajemen K3 perlu melakukan tinjauan ulang atau evaluasi terhadap kebijakan K3, seperti revisi surat

kebijakan K3. Revisi dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya.

Kebijakan K3 yang tertulis secara rinci di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang belum ada. Hal ini membuat tidak adanya evaluasi kebijakan K3 yang tertulis sesuai dengan pedoman sistem manajemen K3 sehingga evaluasi kebijakan K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang memiliki ketercapaian 0%, namun pihak Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang sebenarnya melaksanakan evaluasi secara praktis, termasuk kekurangan sarana penunjang K3 yang ada. Evaluasi dilakukan dengan adanya laporan dari instruktur/guru yang nantinya akan dibicarakan kepada kepala bengkel, ketua program studi keahlian teknologi konstruksi dan properti, dan akan masuk pada rapat tahunan. Evaluasi yang dilaksanakan satu arah ini akan lebih baik jika dilakukan dua arah. Dalam hal ini ketua program studi keahlian teknologi konstruksi dan properti juga turut serta dalam evaluasi K3 di setiap bengkel yang dapat diwujudkan dalam suatu sistem manajemen K3, sehingga sejalan dengan peningkatan pelaksanaan K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang yang akan diupayakan pada masa mendatang.

5. Hambatan dalam Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang

Hambatan yang ada di dalam implementasi sistem manajemen K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang antara lain:

- a. Belum ada pelatihan khusus instruktur/guru terkait dengan K3. Tidak adanya organisasi khusus di dalam penerapan K3, sehingga hal-hal kecil yang sebenarnya penting tidak terlalu diperhatikan seperti adanya tujuan dan program dari K3 sehingga tidak ada target dalam penerapan K3, tidak ada pencatatan dan pelaporan kecelakaan kerja sehingga tidak mengetahui statistik peserta didik yang mengalami kecelakaan kerja, hal ini digunakan untuk dasar evaluasi pelaksanaan K3, dan tidak ada evaluasi setiap tahunnya yang dapat membuat penerapan K3 dapat lebih maksimal.
- b. Hambatan yang berhubungan dengan minimnya ketersediaan dokumentasi tentang sistem manajemen K3, sehingga mempengaruhi implementasi sistem manajemen K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang.

6. Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam implementasi sistem manajemen K3 diatas yaitu perlu diadakannya pelatihan khusus instruktur tentang K3. Pembentukan organisasi khusus dalam penerapan sistem manajemen K3, pembuatan kebijakan secara tertulis tentang K3, pembuatan tujuan dan program

secara tertulis tentang K3, membuat data serta pencatatan dan pelaporan tentang kecelakaan kerja, dan mengadakan evaluasi tentang penerapan K3 sehingga mutu K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang akan terus meningkat, dan persyaratan dalam pelaksanaan sistem manajemen K3 dapat didokumentasikan.

Dokumentasi tentang sistem manajemen K3 diharapkan ada perkembangan lebih baik lagi dan ada upaya dalam peningkatan sistem manajemen K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang.

Variasi data hasil penelitian menunjukkan kurang terkoordinirnya pelaksanaan K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang. Terlebih di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang memiliki beberapa kompetensi keahlian seperti Teknik Konstruksi Kayu dan Teknik Konstruksi Batu dan Beton sehingga membutuhkan penerapan K3 yang cukup tinggi dan bervariasi. Secara ideal K3 dilaksanakan dalam suatu sistem manajemen yang terhubung satu sama lain, sehingga pelaksanaan K3 pada setiap kompetensi dapat terkontrol.

Belum tercapainya hasil yang baik, dikarenakan pelaksanaan penerapan K3 berdasarkan sistem manajemen K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang belum diterapkan. Hal ini karena belum ada keputusan dari Ketua Program Studi Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti yang menetapkan setiap bengkel di Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti harus menggunakan sistem manajemen K3 dalam

penerapan K3 di Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang.

Hingga saat ini belum ada peraturan yang secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa lembaga pendidikan wajib menerapkan sistem manajemen K3, namun bila mempertimbangkan dari beragamnya kompetensi keahlian, dengan banyaknya orang yang berada di lingkungan Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang serta potensi bahaya yang dapat timbul dari pelaksanaan kegiatannya, maka penerapan sistem manajemen K3 menjadi perlu di perhatikan.

Sistem manajemen K3 ini perlu dilaksanakan dengan menyesuaikan keadaan dan karakteristik dari lembaga pendidikan. Bagaimanapun juga sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/Men/1996 Pasal 3, setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan sistem manajemen K3.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/Men/1996 tersebut, penerapan sistem manajemen K3 dipertimbangkan dalam mengantisipasi era globalisasi perdagangan. Bengkel Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti SMK N 1 Magelang yang menghasilkan SDM yang akan bersaing dalam era globalisasi perdagangan, perlu membentuk dan mengenalkan budaya K3 terhadap peserta didiknya. Kesiapan Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti dalam melaksanakan penerapan sistem manajemen K3 sangat dibutuhkan.